



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 142 TAHUN 2020

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUNDU  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mundu Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUNDU KABUPATEN CIREBON.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Mundu yang selanjutnya disebut Puskesmas Mundu adalah UPTD Puskesmas Mundu.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas non rawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat, dan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.
17. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumberdaya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) SPM Kesehatan dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Kesehatan pada Puskesmas.
- (2) SPM Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III  
TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI,  
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai,  
dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Mundu, meliputi :

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan kefarmasian; dan
- h. pelayanan laboratorium.

Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pelayanan kesehatan dasar meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;

- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- m. pelayanan imunisasi;
- n. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- o. pelayanan promosi kesehatan;
- p. pelayanan kesehatan lingkungan;
- q. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- u. pelayanan kesehatan olahraga;
- v. pelayanan kesehatan kerja;
- w. pelayanan kesehatan indera; dan
- x. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada Puskesmas Mundu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Mundu, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENERAPAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

## Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - g. pelaksanaan anggaran; dan
  - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

## Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 142 Tahun 2020

TANGGAL : 15 Desember 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUNDU KABUPATEN CIREBON.

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN  
UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS MUNDU**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan pemeriksaan umum	Waktu tunggu pendaftaran <5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator pendaftaran
		Kelengkapan <i>informed consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Petugas rekam medis

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan pemeriksaan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokter
		Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan	8 menit	8 menit	8 menit	8 menit	8 menit	8 menit	8 menit	Petugas rekam medis
		Pelayanan pemeriksaan penyakit menular	20%	10%	10%	15%	17%	18%	20%	Petugas P2P
		Pelayanan pemeriksaan lansia	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Petugas lansia
2	Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut	Pemeriksaan gigi dan mulut	4%	2,5%	2,5%	2,5%	3%	3%	4%	Dokter gigi dan perawat gigi



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kelengkapan <i>informed consent</i> sebelum tindakan medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokter
5	Pelayanan gizi yang bersifat UKP	Pelayanan konseling	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Petugas gizi
		Pelayanan SDIDTK	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Petugas gizi
6	Pelayanan persalinan	Adanya tim poned	Ada Tim PONED terlatih	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bidan koordinator
		Pemberi pelayanan persalinan normal	Ada Bidan terlatih	Ada Bidan terlatih	Ada Bidan terlatih	Ada Bidan terlatih	Ada Bidan terlatih	Ada Bidan terlatih	Ada Bidan terlatih	Bidan koordinator
		Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidan koordinator
		Kelengkapan <i>informed consent</i> sebelum tindakan medis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidan koordinator

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pelayanan kefarmasian	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Apoteker
		Pemberi pelayanan farmasi	Apoteker dan Ast. Apoteker Terlatih	Koordinator Farmasi						
		Ketersediaan formularium	Tersedia	Koordinator Farmasi						
		Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Pelayanan laboratorium	Pemberian pelayanan laboratorium  Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	Analisis Pend. minimal D3  100%	Koordinator Laboratorium  Koordinator Laboratorium  Koordinator Laboratorium							

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3 Kemampuan mikroskopis TB Paru	4 100%	5 90%	6 100%	7 100%	8 100%	9 100%	10 100%	11 Koordinator Laboratorium

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT MUNDU KABUPATEN CIREBON.

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN  
UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA UPTD PUSKESMAS MUNDU**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %	95,09 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	Penanggung jawab UKM
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	99,80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %	103,72 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	94,16 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	
				PENCAPAIAN AWAL	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	20 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	64 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
13	Pelayanan Imunisasi	a. Cakupan Desa <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	93 %	83,3 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
		b. Cakupan IDL	93 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		c. Cakupan BIAS Td	98 %	93,76 %	95 %	96 %	97 %	98 %	100 %	Penanggung jawab UKM	
		d. Cakupan BIAS DT	100%	95,13%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM	
		e. Cakupan BIAS Campak	100%	95,13%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM	
14	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit										
	1) Pelayanan Penyakit Kusta	a. Angka kesembuhan /RFT ( <i>Release From Treatment</i> ) MB	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM	
		b. Angka kesembuhan /RFT ( <i>Release From Treatment</i> ) PB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM	
	2) Pelayanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	Pencegahan DBD dengan penghitungan Angka Bebas Jentik (ABJ)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3) Pelayanan Penyakit ISPA	Persentase cakupan penemuan penderita <i>pneumonia</i> balita	100 %	111 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
	4) Pelayanan Penyakit Diare	Persentase cakupan pelayanan diare pada kasus semua umur	100 %	59,73 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
	5) Pelayanan Penyakit Filariasis	Cakupan tata laksana kasus filariasis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
	6) Pelayanan Penyakit Kecacingan	Cakupan tata laksana kasus kecacingan	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM
15	Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga	100%	98 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
16	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pengawasan rumah sehat	85%	42,54 %	45 %	50 %	60 %	70 %	85 %	85 %	Penanggung jawab UKM
17	Pelayanan Gizi yang bersifat UKM	a. ASI Eksklusif	100%	88,63 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
		b. Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
18	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	a. Kunjungan rawat jalan umum mendapat asuhan keperawatan individu b. Cakupan keluarga mandiri III dan IV	100 % 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM
19	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	a. Cakupan pembinaan kesehatan gigi di masyarakat b. Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI (posyandu)	80% 80%	60 %	80 %	80 %	80%	80 %	80%	Penanggung jawab UKM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	Pembinaan kelompok Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Penanggung jawab UKM	
21	Pelayanan Kesehatan Olahraga	Pembinaan kelompok olahraga	100%	83,78%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM	
22	Pelayanan Kesehatan Kerja	Jumlah pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Penanggung jawab UKM	
23	Pelayanan Kesehatan Indera	a. Penanganan kasus kelainan refraksi b. Penanganan penyakit katarak	100 %	87,15 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanggung jawab UKM	
24	Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya	a. Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		b. Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab UKM

**BUPATI CIREBON,**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**RAHMAT SUTRISNO**  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI

### LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 142 Tahun 2020

TANGGAL : 15 Desember 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT MUNDU  
KABUPATEN CIREBON

#### A. INDIKATOR SPM UKP

##### 1. Pelayanan pemeriksaan umum

Judul	<b>Waktu tunggu pendaftaran &lt; 5 menit</b>
Dimensi Mutu	Kualitas dan keamanan
Tujuan	Teregistrasinya pasien sesuai dengan sub standar waktu yang ditetapkan (cepat, tepat, dan akurat)
Definisi Operasional	Lama waktu pendaftaran adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari pasien diidentifikasi sampai sesuai dengan standar SIK
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah rata-rata yang dibutuhkan untuk registrasi sesuai standar SIK dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah kunjungan yang teregistrasi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi kunjungan
Target	< 5 menit
Langkah Kegiatan	Persiapan sarana dan prasarana, pengaturan tenaga dan sampling survei
Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator SP2TP

Judul	<b>Kelengkapan <i>informed consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab rekam medis untuk memberikan informasi kepada pasien dan mendapatkan informasi dari pasien

Definisi Operasional	<i>Informed consent</i> adalah persetujuan yang diberikan kepada pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan lengkap mengenai rekam medis pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien yang didata
Denominator	Jumlah pasien yang mendapat rekam medis yang disurvei dalam 1 bulan
Sumber Data	Survei
Target	100 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Petugas Rekam Medis

Judul	<b>Pelayanan pemeriksaan umum</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan rawat jalan oleh tenaga yang kompeten
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan rawat jalan adalah dokter dan tenaga perawat yang kompeten (minimal D3)
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	6 bulan
Numerator	Jumlah tenaga dokter dan perawat yang memberikan pelayanan di pelayanan rawat jalan yang sesuai dengan ketentuan
Denominator	Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang bertugas di pelayanan rawat jalan
Sumber Data	Kepegawaian
Target	100 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Penanggung jawab pelayanan rawat jalan

Judul	<b>Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan</b>
Dimensi Mutu	Efektivitas, kenyamanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan pendaftaran rawat jalan

Definisi Operasional	Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap 3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis sampel rawat jalan yang diamati
Denominator	Total sampel penyediaan rekam medis yang diamati (N tidak kurang dari 50)
Sumber Data	Hasil survei pengamatan di ruang pendaftaran rawat jalan untuk pasien baru di ruang rekam medis untuk pasien lama
Target	≤ 10 menit
Penanggung jawab Pengumpulan data	Petugas Rekam Medis

Judul	<b>Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua Pasien dengan Penyakit Menular membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan Penyakit Menular membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah pasien yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua pasien secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program Penyakit Menular

Target	20% jumlah pasien yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung jawab Pengumpulan data	Programer Penyakit Menular

Judul	<b>Pelayanan Pemeriksaan Lansia</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada lansia yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah lansia yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua lansia secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program Lansia
Target	20% lansia yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung jawab Pengumpulan data	Programer Lansia/Simpus

## 2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Judul	<b>Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan gigi yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan gigi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan

Numerator	Jumlah pasien yang dilayani oleh petugas setiap hari
Denominator	Jumlah semua pasien yang dilayani petugas secara kumulatif dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Laporan harian, laporan bulanan
Target	100 % pasien yang datang dapat dilayani dengan baik
Penanggung jawab Pengumpulan data	Dokter gigi dan perawat gigi

### 3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP

Judul	<b>Pelayanan KIA</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan, dan kualitas
Tujuan	Semua Pasangan Usia Subur (PUS), Bumil, Bulin, Bufas yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS), Bumil, Bulin, Bufas yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Bumil, Bulin, Bufas yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua Pasangan Usia Subur (PUS), Bumil, Bulin, Bufas secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program KIA
Target	100% lansia yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung jawab Pengumpulan data	Programer KIA/Simpus

Judul	<b>Pelayanan KB</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua Pasangan Usia Subur yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP

Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatan sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua Pasangan Usia Subur (PUS) secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program KIA
Target	100% lansia yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung jawab Pengumpulan data	Programer KIA/Simpus

Judul	<b>Pelayanan imunisasi</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas serta taat SOP
Tujuan	Semua sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik dan sesuai SOP
Definisi Operasional	Pemberian imunisasi kepada semua sasaran imunisasi (bayi) agar mendapatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan, triwulan dan tahunan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan
Denominator	Jumlah kumulatif semua sasaran yang mendapatkan imunisasi dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Laporan kegiatan bulanan petugas imunisasi
Target	97.5 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator Imunisasi

Judul	<b>Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua pasien bayi, balita yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi, balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah bayi, balita yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua bayi, balita secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program MTBS
Target	100% bayi, balita yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung jawab Pengumpulan data	Programer MTBS/Simpus

#### 4. Pelayanan gawat darurat

Judul	<b>Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikasi (ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD/ GELS) yang masih berlaku</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya Pelayanan gawat darurat oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidang kegawatdaruratan
Definisi Operasional	Tenaga kesehatan yang berkompeten pada gawat darurat adalah tenaga yang sudah memiliki sertifikat pelatihan ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD/ GELS
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD/ GELS
Denominator	Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan

Sumber Data	Kepegawaian
Target	100 %
Penanggung jawab	Kepala Tata Usaha Puskesmas

Judul	<b>Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam memberikan Pelayanan Gawat Darurat
Definisi Operasional	<i>Life Saving</i> adalah upaya penyelamatan jiwa manusia dengan urutan <i>Airway, Breath, Circulation</i>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah kumulatif pasien yang mendapat pertolongan <i>life saving</i> di Unit Gawat Darurat
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang membutuhkan penanganan <i>life saving</i> di Unit Gawat Darurat
Sumber Data	Rekam medis di Unit Gawat Darurat
Target	100 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Penanggung jawab Ruang Tindakan

Judul	<b>Kelengkapan <i>informed consent</i> sebelum tindakan medis</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab dokter untuk memberikan informasi kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medis yang akan dilakukan
Definisi Operasional	<i>Informed concent</i> adalah persetujuan yang diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien tersebut
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei yang mendapatkan informasi lengkap sebelum memberikan persetujuan tindakan medis dalam 1 bulan

Denominator	Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei dalam 1 bulan
Sumber Data	Survei
Target	100 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Dokter Ruang Tindakan

### 5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP

Judul	<b>Pelayanan konseling</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua pasien yang membutuhkan layanan kesehatan konseling dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan konseling kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah pasien yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua Pasien secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program Promkes
Target	5% Pasien yang datang membutuhkan layanan konseling kesehatan dapat terlayani
Penanggung jawab Pengumpulan data	Programer Promkes/Simpus

Judul	<b>Pelayanan SDIDTK</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua bayi, balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan tumbuh kembang yang dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi, balita yang membutuhkan pelayanan tumbuh kembang agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah bayi balita yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua bayi, balita secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program Gizi
Target	2% bayi, balita yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung jawab Pengumpulan data	Programer Gizi/Simpus

## 6. Pelayanan persalinan

Judul	<b>Adanya Tim PONED</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi Teknis
Tujuan	Tersedianya Tim PONED yang mampu menangani dan merujuk : hipertensi dalam kehamilan; tindakan persalinan dengan distorsi bahu; pendarahan <i>post partum</i> ; infeksi nifas; BBLR dan hipotermia; asfiksia pada bayi; gangguan nafas pada bayi; kejang pada bayi baru lahir; infeksi bayi baru lahir; persiapan umum sebelum tindakan kedaruratan obstetri neonatal dasar antara lain kewaspadaan universal standar
Definisi Operasional	Tim PONED adalah Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang bertujuan untuk menghindari rujukan lebih dari 2 jam dan untuk memutus mata rantai rujukan itu sendiri
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Tersedianya Tim PONED terlatih
Denominator	1
Sumber Data	Pengelola Kepegawaian
Target	Ada Tim PONED terlatih
Penanggung jawab Pengumpulan data	Bidan Koordinator

Judul	<b>Pemberian Pelayanan Persalinan Normal</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Menjaga keamanan ibu hamil

Definisi Operasional	Adalah penolong persalinan normal yang bersertifikat secara kedinasan dan organisasi profesi
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pemberi pelayanan Persalinan
Denominator	Jumlah Penolong Persalinan yang ada pada periode tertentu
Sumber Data	PONED
Target	Ada Bidan Terlatih
Penanggung jawab Pengumpulan data	Bidan Koordinator

Judul	<b>Kepatuhan <i>hand hygiene</i></b>
Dimensi Mutu	Keamanan dan keselamatan
Tujuan	Tersedianya Pelayanan di Puskesmas yang mendukung keselamatan pasien dan efektivitas pelayanan melalui cuci tangan
Definisi Operasional	Kepatuhan <i>hand hygiene</i> adalah kepatuhan petugas terhadap ketentuan cuci tangan
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah petugas rawat jalan yang mematuhi ketentuan cuci tangan
Denominator	Jumlah seluruh petugas rawat jalan
Sumber Data	Survei Petugas Rawat Jalan
Target	≥ 90 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator Rawat Jalan

Judul	<b>Kelengkapan <i>Informed Consent</i> sebelum tindakan medis</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Menjaga keamanan pemberi layanan dari tuntutan hukum
Definisi Operasional	Adalah persetujuan pelanggan untuk menerima tindakan dari petugas Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	1 bulan

Numerator	Jumlah <i>informed consent</i> lengkap
Denominator	Jumlah tindakan
Sumber Data	Ruang pelayanan
Target	100%
Penanggung jawab Pengumpulan data	PJ UKP

## 7. Pelayanan kefarmasian

Judul	<b>Penulisan resep sesuai formularium</b>
Dimensi Mutu	Efisiensi
Tujuan	Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien
Definisi Operasional	Formularium obat adalah daftar obat yang digunakan di Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah resep yang diambil sebagai sampel yang sesuai formularium dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh resep yang diambil sebagai sampel dalam satu bulan (minimal 50)
Sumber Data	Survei
Target	100 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Apoteker

Judul	<b>Pemberi pelayanan farmasi</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan obat
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan obat adalah asisten apoteker yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	3 bulan sekali
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang/kamar obat
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang/kamar obat
Sumber Data	Ruang obat
Target	Tersedia tenaga Apoteker

Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator Farmasi
--------------------------------------	---------------------

Judul	<b>Ketersediaan Formularium</b>
Dimensi Mutu	Efisiensi
Tujuan	Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien
Definisi Operasional	Formularium obat adalah daftar obat yang digunakan di Puskesmas sesuai dengan Formularium Nasional
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Formularium Puskesmas
Denominator	Formularium Nasional
Sumber Data	Survei
Target	Tersedia dan update 3 tahun terakhir
Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator Farmasi

Judul	<b>Tidak adanya kejadian salah pemberian obat</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya kejadian kesalahan dalam pemberian obat
Definisi Operasional	Kesalahan pemberian obat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salah dalam memberikan jenis obat</li> <li>2. Salah dalam memberikan dosis obat</li> <li>3. Salah orang</li> <li>4. Salah jumlah</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien instalasi obat yang disurvei dikurangi dengan jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat
Denominator	Jumlah seluruh pasien instalasi obat yang disurvei
Sumber Data	Survei
Target	100 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator Farmasi

## 8. Pelayanan laboratorium

Judul	<b>Pemberi pelayanan laboratorium</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan laboratorium adalah analis laboratorium yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	3 bulan sekali
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang laboratorium
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang laboratorium
Sumber Data	Ruang Laboratorium
Target	Tersedianya tenaga Analis
Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator Laboratorium

Judul	<b>Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Kesalahan administrasi dalam pelayanan laboratorium meliputi kesalahan identifikasi, kesalahan registrasi, kesalahan pelabelan sampel, dan kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium tanpa kesalahan administrasi dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam bulan tersebut
Sumber Data	Catatan di laboratorium
Target	100 %

Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator laboratorium
--------------------------------------	--------------------------

Judul	<b>Tidak adanya kejadian tertukar spesimen</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan pasien
Tujuan	Tergambarnya ketelitian dalam pelaksanaan pengelolaan spesimen laboratorium
Definisi Operasional	Kejadian tertukar spesimen pemeriksaan laboratorium adalah tertukarnya spesimen milik orang yang satu dengan orang lain
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan dan sentinel <i>event</i>
Periode Analisa	1 bulan dan sentinel <i>event</i>
Numerator	Jumlah seluruh spesimen laboratorium yang diperiksa dikurangi dengan jumlah spesimen yang tertukar
Denominator	Jumlah seluruh spesimen laboratorium yang diperiksa
Sumber Data	Rekam medis, laporan keselamatan pasien
Target	100 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator laboratorium

Judul	<b>Kemampuan memeriksa HIV/AIDS</b>
Dimensi Mutu	Efektivitas dan keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan laboratorium Puskesmas dalam memeriksa HIV/AIDS
Definisi Operasional	Pemeriksaan laboratorium HIV/AIDS adalah pemeriksaan skrining HIV kepada pasien yang diduga mengidap HIV/AIDS
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Ketersediaan peralatan untuk pemeriksaan Elisa test
Denominator	Kelengkapan pemeriksaan HIV/AIDS
Sumber Data	Catatan di laboratorium
Target	Tersedia
Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator Laboratorium

Judul	<b>Kemampuan Mikroskopis Tuberkulosis Paru</b>
Dimensi Mutu	Efektivitas dan keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan laboratorium Puskesmas dalam memeriksa mikroskopis tuberkulosis paru
Definisi Operasional	Pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis paru adalah pemeriksaan mikroskopis untuk mendeteksi adanya <i>mycobacterium tuberculosis</i> pada sediaan dahak pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Ketersediaan tenaga terlatih, peralatan, dan reagen untuk pemeriksaan tuberkulosis
Denominator	Sesuai dengan standar Puskesmas
Sumber Data	Catatan di laboratorium
Target	Tersedianya tenaga, peralatan, dan reagen
Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator laboratorium

## B. INDIKATOR SPM UKM

### 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Judul	<b>Pelayanan kesehatan ibu hamil</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam mengakses pelayanan ibu hamil
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar meliputi kunjungan 4 kali selama periode kehamilan sesuai standar 10T di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah sasaran bumil di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Simpus dan kohort ibu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan bumil, pembuatan kantong persalinan, pelayanan antenatal, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
Penanggung jawab	Koordinator KIA

### 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	<b>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</b>
Dimensi Mutu	Akses dan keterjangkauan
Tujuan	Agar persalinan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah pelayanan kesehatan ibu bersalin pada persalinan normal dan komplikasi sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan

	persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Semua persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Mundu
Sumber Data	Buku KIA
Target	100 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Koordinator Persalinan

### 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	<b>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Terpeliharanya kesehatan bayi umur 0-28 hari melalui pelayanan kesehatan maupun pelayanan melalui kunjungan rumah
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah jumlah bayi usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah bayi usia 0-28 hari yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Seluruh bayi baru lahir di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Simpus, kohort ibu, kohort bayi
Target	95%
Langkah Kegiatan	Pemantauan pasca persalinan dan MTBM, pelayanan kunjungan neonatus di dalam gedung dan di luar gedung, pelayanan kunjungan neonatus, audit kesakitan dan kematian neonatus, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
Penanggung jawab	Koordinator KIA

### 4. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	<b>Pelayanan kesehatan balita</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas

Tujuan	Menemukan secara dini gangguan kesehatan dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada balita
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap balita berusia 0-59 bulan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kesehatan balita sehat Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang</li> <li>b. Pelayanan kesehatan balita sakit Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3
Denominator	Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	SIMPUS, Kohort Balita, Buku KIA, KMS dan Register MTBS
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi kesehatan balita (MTBM, MTBS, SDIDTK) pelayanan kunjungan balita dan pra sekolah di dalam maupun di luar gedung serta pelayanan rujukan
Penanggung jawab	Bidan Koordinator

### 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 sesuai standar di wilayah

	kerja minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu tahun sekali
Periode Analisa	Satu tahun sekali
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan 9 di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan penjangkaran anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan indera)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemberian pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil penjangkaran, pencatatan dan pelaporan
Penanggung jawab	Programer UKS

## 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Judul	<b>Pelayanan kesehatan pada usia produktif</b>
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Simpus dan hasil pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien, serta hasil kegiatan Posbindu
Target	100%

Langkah Kegiatan	Skrining faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku, konseling, pencatatan, dan pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
Penanggung jawab	Programer PTM

### 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Judul	<b>Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Melayani Usila yang berbentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk rujukannya
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah cakupan pengunjung usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penduduk usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Buku pedoman Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia dan buku pedoman Puskesmas Santun Lanjut Usia
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan, perencanaan kegiatan, pelayanan
Penanggung jawab	Programer Usila

### 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	<b>Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk memudahkan agar dapat dilakukan upaya promotif, preventif, dan kuratif sederhana
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah setiap penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita Hipertensi usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	PIS-PK
Target	100%
Penanggung jawab Pengumpulan data	Programer PTM

### 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Judul	<b>Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)</b>
Dimensi Mutu	Kesehatan, keselamatan
Tujuan	Sebagai acuan petugas untuk menemukan kasus baru penderita Diabetes Melitus
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita DM adalah Cakupan jumlah penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita DM berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort kunjungan penderita Diabetes Melitus
Target	100 %
Penanggung jawab Pengumpulan data	Programer PTM

## 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Judul	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	pemeriksaan untuk melihat adanya gejala awal gangguan kesehatan jiwa dengan metode 2 menit
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah Jumlah ODGJ berat di Puskesmas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Numerator	Jumlah ODGJ berat di Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Kohort Kunjungan Penderita ODGJ
Target	100%
Langkah kegiatan	Penyediaan buku pedoman Keswa, pelayanan kesehatan ODGJ berat di Puskesmas, pelaksanaan kunjungan rumah, monitoring dan evaluasi.
Penanggung jawab	Programer Kesehatan jiwa

## 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Judul	<b>Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis adalah jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan

Numerator	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan TB
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM TB, penyediaan KIE TB, pelayanan dan pemeriksaan TB, rujukan kasus TB, jejaring kemitraan pelayanan TB, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung jawab	Programer TB

**12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Tertular Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)**

Judul	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna NAPZA dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu minggu satu kali
Periode Analisa	Setiap satu tahun
Numerator	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapat pengobatan HIV sesuai standar di Fasyankes dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan program HIV
Target	100%
Penanggung jawab	Programer HIV

### 13. Pelayanan Imunisasi

#### a. Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Judul	<b>Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Mengetahui akses wilayah terhadap kelengkapan dan intensitas imunitas yang didapatkan dari sasaran bayi (0-11 bulan)
Definisi Operasional	Cakupan desa UCI adalah desa dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah desa UCI di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah desa yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Simpus, kohort bayi, KMS/buku KIA serta buku catatan imunisasi
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS imunisasi dan Monev
Penanggung jawab	Koordinator imunisasi dan bidan penanggung jawab desa

#### b. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Judul	<b>Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Definisi Operasional	Cakupan IDL adalah Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (HBO 1 kali, Polio 4 kali, DPTHB-Hib 3 kali, Campak 1 kali) di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapatkan imunisasi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	Jumlah sasaran bayi 0-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Sumber Data	Simpus, kohort bayi, KMS/buku KIA serta buku catatan imunisasi
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik, pelayanan imunisasi dan PWS imunisasi
Penanggung jawab	Koordinator imunisasi dan bidan penanggung jawab desa

### c. Cakupan BIAS Td

Judul	<b>Cakupan BIAS Td</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Pemberian imunisasi Td kepada seluruh siswa kelas 2 dan 5 SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat di wilayah kerja Puskesmas
Definisi Operasional	Cakupan Bias Td adalah jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat yang mendapatkan imunisasi Td di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 SD negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat yang mendapatkan imunisasi Td di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 SD negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan Bias
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik
Penanggung jawab	Koordinator Imunisasi

#### d. Cakupan BIAS DT

Judul	<b>Cakupan BIAS DT</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan boster DT kepada anak usia 6-8 tahun atau kelas I SD sehingga menambah kekebalan anak dan terhindar dari penyakit dipteri dan tetanus maupun komplikasinya
Definisi Operasional	Cakupan BIAS DT kelas I SD adalah kegiatan imunisasi anak SD atau sederajat dengan memberikan suntik DT pada murid kelas 1 SD.
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu kali satu tahun
Periode Analisa	Satu kali satu tahun
Numerator	Jumlah murid kelas SD yang mendapatkan imunisasi DT di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah murid kelas I SD yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Data anak SD kelas I absensi kelas
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik
Penanggung jawab	Koordinator Imunisasi

#### e. Cakupan BIAS campak

Judul	<b>Cakupan BIAS campak</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan boster campak kepada usia 6 tahun/kelas 1 sehingga menambah kekebalan anak dan terhindar dari penyakit campak dan komlikasi campak
Definisi Operasional	Cakupan BIAS kelas 1 SD adalah kegiatan imunisasi anak SD atau sederajat dengan memberikan suntikan campak di lengan kiri pada anak SD kelas 1
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan September
Periode Analisa	Setiap bulan September
Numerator	Jumlah murid kelas 1 SD yang mendapat imunisasi campak di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah murid kelas 1 SD yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Sumber Data	Data anak SD kelas 1, absensi kelas
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) imunisasi
Penanggung jawab	Koordinator Imunisasi

#### 14. Pelayanan Penyakit Lainnya (Kusta, DBD, ISPA/Pneumonia, Diare, Filariasis, dan Hepatitis)

##### a. Pelayanan Penyakit Kusta

Judul	Pelayanan Penyakit Kusta
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektifitas
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui pencapaian dan penanganan kasus Kusta oleh petugas Puskesmas dalam waktu tertentu
Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Kusta adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita Kusta untuk mendapatkan pelayanan/pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Angka kesembuhan/RFT (<i>Release From Treatment</i>) MB</li> <li>b. Angka kesembuhan/RFT (<i>Release From Treatment</i>) PB</li> </ul>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita Kusta yang dilayani dalam pada kurun waktu tertentu
Denominator	Target penemuan penderita Kusta yang dilayani dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pengobatan Penderita Kusta
Target	100%
Penanggung jawab	Pelaksana Program Kusta

##### b. Pelayanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Judul	<b>Pelayanan Penyakit Demam Berdarah Dengue ( DBD )</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan, efektif dan efisien
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui presentase rumah dan tempat yang bebas jentik dalam upaya pencegahan penyakit DBD

Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita DBD dengan cara Pencegahan DBD dengan penghitungan Angka Bebas Jentik (ABJ)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah rumah dan tempat umum yang diperiksa jentik dan hasilnya negatif tidak ada jentik dalam waktu tertentu
Denominator	Jumlah rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan PJB dan PSN
Target	95%
Penanggung jawab	Pelaksana program DBD

**c. Pelayanan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut ISPA**

Judul	Pelayanan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui besaran penemuan balita pneumonia oleh petugas Puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita ISPA dengan tata laksana sesuai standar pelayanan/pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah estimasi penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan program ISPA
Target	86%
Langkah kegiatan	Pelayanan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
Penanggung jawab	Pelaksana program ISPA

**d. Pelayanan Penderita Diare**

Judul	Pelayanan Penyakit Diare
Dimensi Mutu	Keselamatan

Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui pencapaian dan penanganan kasus diare oleh petugas Puskesmas dalam waktu tertentu
Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Diare adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita diare dengan tata laksana sesuai standar pelayanan/pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita diare semua umur yang dilayani dalam pada kurun waktu tertentu
Denominator	Target penemuan penderita diare semua umur dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan program diare
Target	100%
Langkah kegiatan	Pelayanan Penyakit Diare
Penanggung jawab	Pelaksana Program Diare

#### e. Pelayanan Penyakit Filariasis

Judul	<b>Pelayanan Penyakit Filariasis</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pasien dengan filariasis mendapatkan tata laksana penanganan sesuai standar
Definisi Operasional	Cakupan pelayanan penderita Filariasis adalah persentase kasus Filariasis yang dilakukan tata laksana minimal 7 kali kunjungan rumah di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu satu tahun.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Kasus Filariasis yang dilakukan tata laksana Filariasis
Denominator	Jumlah Kasus Filariasis yang ditemukan dalam 1 tahun x 100%
Sumber Data	Laporan P2 Filariasis, SP2TP
Target	100%
Langkah kegiatan	Penegakan diagnosa, tata laksana, Monev dan Promkes
Penanggung jawab	Koordinator P2M dan surveilans

#### f. Pelayanan Penyakit Kecacingan

Judul	<b>Pelayanan Penyakit Kecacingan</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Memberikan pelayanan untuk mengetahui pencapaian dan penanganan kasus Kecacingan oleh petugas Puskesmas dalam waktu tertentu
Definisi Operasional	Pelayanan Penyakit Kecacingan adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita Kecacingan dengan tata laksana sesuai standar pelayanan/pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita Kecacingan yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Target penemuan penderita Kecacingan yang dilayani dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan program Kecacingan
Target	100%
Penanggung jawab	Pelaksana program Kecacingan

#### 15. Pelayanan Promosi Kesehatan

Judul	<b>Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga dengan melihat 10 indikator perilaku di rumah tangga
Definisi Operasional	Cakupan rumah tangga ber-PHBS adalah persentase rumah tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Numerator	Jumlah rumah tangga ber-PHBS di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Hasil pendataan PHBS
Target	65%

Langkah kegiatan	Penentuan Rumah Tangga (RT) yang disurvei, kunjungan rumah, pengkajian, analisa, tindak lanjut
Penanggung jawab	Programer Promkes

## 16. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Judul	<b>Cakupan pengawasan rumah sehat</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Mengawasi rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai yang tidak terbuat dari tanah (kedap air)
Definisi Operasional	Cakupan pengawasan rumah sehat adalah persentase jumlah rumah sehat yang ada di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu 1 tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Numerator	Jumlah rumah sehat di suatu wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah rumah yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Buku catatan kegiatan di lapangan, Buku kunjungan lapangan, Register kesehatan lingkungan, Register penyuluhan, Laporan LB4 dan LSDD
Target	75%
Penanggung jawab	Programer Kesling

## 17. Pelayanan Gizi Yang Bersifat UKM

### a. ASI Eksklusif

Judul	<b>ASI Eksklusif</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi serta membantu melindungi dari berbagai penyakit dan infeksi agar tidak mudah sakit
Definisi Operasional	Bayi yang diberi ASI Eksklusif adalah proses pemberian

	ASI Eksklusif pada bayi menginjak usia 6 bulan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Semua bayi yang memperoleh ASI Eksklusif
Denominator	Semua bayi umur 0-6 bulan
Sumber Data	Buku KIA
Target	100 %
Penanggung jawab	Koordinator KIA

**b. Remaja Putri Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)**

Judul	<b>Remaja putri mendapatkan TTD</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mencegah kematian dan komplikasi
Definisi Operasional	Persentase remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu terhadap jumlah remaja putri yang ada dikali 100%.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah remaja putri mendapat TTD
Denominator	Jumlah seluruh remaja putri 12-18 tahun di sekolah dikali 100%
Sumber Data	Laporan Gizi
Target	100 %
Penanggung jawab	Koordinator Gizi

**c. Persentase Balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan**

Judul	<b>Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mencegah kematian dan komplikasi
Definisi Operasional	Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan adalah jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan terhadap jumlah balita kurus dikali 100%.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan

Numerator	Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan
Denominator	Jumlah seluruh balita kurus yang ada dikali 100%
Sumber Data	Laporan Gizi
Target	100 %
Penanggung jawab	Koordinator Gizi

## 18. Pelayanan Pencegahan dan Pendalian Penyakit

### a. Kunjungan Rawat Jalan Umum Mendapat Asuhan Keperawatan Individu

Judul	<b>Kunjungan rawat jalan umum mendapat askep individu</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Membina individu rawan kesehatan
Definisi Operasional	Jumlah pasien rawat jalan dalam gedung yang mendapat asuhan keperawatan individu langsung oleh perawat
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Numerator	Jumlah pasien yang mendapat asuhan keperawatan langsung oleh perawat pada rawat jalan
Denominator	Jumlah pasien yang dilakukan pengkajian, pemeriksaan fisik oleh perawat pada kunjungan rawat jalan, IGD di Puskesmas pada kurun waktu satu tahun dikali 100%
Sumber Data	SP3 LB 4 R1,R2 PHN
Target	100%
Penanggung jawab	Programer Perkesmas

### b. Cakupan Keluarga Mandiri III dan IV

Judul	<b>Cakupan Keluarga Mandiri III dan IV</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Membina keluarga sampai dengan 6 kali kunjungan
Definisi Operasional	Cakupan hasil akhir tingkat kemandirian Keluarga (KM III dan IV) pada keseluruhan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatannya, setelah mendapatkan askep keluarga minimal 4 kali kunjungan .
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali

Numerator	Jumlah keluarga rawan yang dibina yang memenuhi kriteria KM III dan IV di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Seluruh keluarga rawan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Sumber Data	SP3 LB 4 R1 R2 PHN
Target	100%
Penanggung jawab	Programer Perkesmas

## 19. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

### a. Cakupan Pembinaan Kesehatan Gigi di Masyarakat

Judul	<b>Cakupan pembinaan kesehatan gigi di masyarakat</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	pendekatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan gigi, dengan mengintegrasikan upaya promotif, preventif, kesehatan gigi pada berbagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berlandaskan pendekatan <i>Primary Health Care</i>
Definisi Operasional	Cakupan UKBM adalah persentase UKBM yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu setahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Numerator	Jumlah UKBM yang mendapat pembinaan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah UKBM yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Buku catatan pembinaan ke UKBM
Target	60%
Langkah kegiatan	Pendataan, pengaturan pelayanan dan petugas, pelayanan kesehatan tingkat pertama
Penanggung jawab	Programer Kesgimul

**b. Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI**

Judul	<b>Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Pelayanan asuhan sistematik yang ditujukan bagi semua anak sekolah tingkat Pendidikan dasar dalam bentuk paket promotif, paket preventif, paket paripurna.
Definisi Operasional	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan mulut siswa SD adalah persentase siswa SD yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dari petugas Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Numerator	Jumlah siswa SD yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut oleh petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah siswa SD yang berada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Sumber Data	Catatan pembinaan yang dilakukan ke SD/MI
Target	80%
Langkah kegiatan	Pendataan, pengaturan pelayanan dan petugas, pelayanan kesehatan tingkat pertama
Penanggung jawab	Dokter gigi/Perawat gigi

**20. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer**

Judul	<b>Pembinaan Kelompok Tanaman Obat Keluarga (TOGA)</b>
Dimensi Mutu	Kualitas dan kuantitas
Tujuan	Membina kelompok TOGA
Definisi Operasional	Cakupan Pembinaan Kelompok TOGA adalah Cakupan Kelompok TOGA yang dibina oleh petugas Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan sekali
Periode Analisa	1 tahun sekali
Numerator	Jumlah kelompok TOGA yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas
Denominator	Jumlah kelompok TOGA yang ada di wilayah kerja

	Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register Pelayanan Kesehatan Tradisional
Target	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Programer Batra

## 21. Pelayanan Kesehatan Olahraga

Judul	<b>Pembinaan kelompok olahraga</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani melalui aktifitas fisik dan/atau olahraga
Definisi Operasional	Cakupan pembinaan kelompok olahraga adalah cakupan kelompok olahraga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun, yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun 2 kali
Periode Analisa	1 tahun 2 kali
Numerator	Jumlah kelompok olahraga yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kelompok olahraga yang berada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Format laporan kesehatan olahraga Puskesmas
Target	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Programer Kesehatan Olahraga

## 22. Pelayanan Kesehatan Kerja

Judul	<b>Jumlah pos upaya kesehatan kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Pembinaan kesehatan kerja dalam pelayanan kesehatan bagi pekerja yang meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, promotif, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang merupakan hak-

	hak dasar pekerja
Definisi Operasional	Jumlah Pos UKK yang terbentuk minimal 1 (satu) Puskesmas terbentuk 1 (satu) Pos UKK di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun 2 kali
Periode Analisa	1 tahun 2 kali
Numerator	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	1 (satu) pos UKK yang terbentuk yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%
Sumber Data	Ada laporan/catatan kegiatan kesehatan kerja (Pos UKK) di Puskesmas sesuai kebutuhan lingkungan berupa Pembinaan kesehatan kerja di Pos UKK (Promotif, Preventif, Kuratif)
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan, sosialisasi, perencanaan kegiatan pelayanan dan Monev
Penanggung jawab	Programer UKK

### **23. Pelayanan Kesehatan Indera**

#### **a. Penanganan Kasus Kelainan Refraksi**

Judul	<b>Penanganan kasus kelainan refraksi</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Pemberitahuan kepada orang tua murid tentang gangguan refraksi untuk ditidakanjuti dengan pemeriksaan ulang ke dokter mata untuk diberikan kaca mata sesuai dengan ukurannya
Definisi Operasional	Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi adalah persentase jumlah penanganan kasus dengan kelainan refraksi pada siswa kelas V s.d IX di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	3 bulan sekali
Periode Analisa	3 bulan sekali

	kelas V s.d IX di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kasus kelainan refraksi yang ditemukan pada siswa kelas V s.d IX di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Buku catatan kelainan refraksi
Target	100%
Langkah kegiatan	Persiapan pra pelayanan, kompetensi tenaga, waktu pelayanan, rujukan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung jawab	Programer Kesehatan indera

#### **b. Penanganan Penyakit Katarak**

Judul	<b>Penanganan Penyakit Katarak</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Menangani lebih lanjut penderita katarak dengan melalui tindakan operasi
Definisi Operasional	Cakupan penanganan penyakit katarak adalah persentase jumlah penanganan penyakit katarak di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	jumlah pasien katarak yang dioperasi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	jumlah pasien terdeteksi katarak di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan kegiatan operasi katarak
Target	100%
Langkah kegiatan	Persiapan pra pelayanan, kompetensi tenaga, waktu pelayanan, rujukan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung jawab	Programer Kesehatan indera

## 24. Pelayanan Kesehatan Pengembangan lainnya.

### a. Cakupan Kelengkapan Surveilans Terpadu Penyakit

Judul	<b>Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Penyelenggaraan surveilans Epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan, dan faktor risiko masalah penyakit menular dan tidak menular
Definisi Operasional	Cakupan kelengkapan Surveilans Terpadu Penyakit adalah cakupan kelengkapan pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah Puskesmas dalam waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah laporan STP yang dilaporkan Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	12 bulan x 100%
Sumber Data	Laporan kelengkapan/ketepatan STP Puskesmas
Target	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Surveilans

### b. Cakupan Ketepatan Surveilans Terpadu Penyakit

Judul	<b>Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan surveilans Epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan dan faktor risiko masalah penyakit menular dan tidak menular
Definisi Operasional	Cakupan ketepatan Surveilans Terpadu Penyakit adalah cakupan ketepatan pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah Puskesmas dalam waktu satu tahun.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan

Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah laporan STP yang dilaporkan Puskesmas tepat waktu pada kurun waktu satu tahun
Denominator	12 bulan x 100%
Sumber Data	Laporan kelengkapan/ ketepatan STP Puskesmas
Target	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Surveilans

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI